

DAMPAK YURIDIS PUTUSAN PTUN NO. 55/G/2012/PTUN-JKT TERHADAP TENDER JASA KONSTRUKSI DI KALIMANTAN BARAT

Oleh:

**SUPARDIONO, SE.
A.21211059**

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang dampak yuridis putusan ptun no. 55/g/2012/ptun-jkt terhadap tender jasa konstruksi di kalimantan barat ".adapun tujuan penulisan tesisi ini adalah Mendapatkan data dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dualisme lembaga pengembangan jasa konstruksi di Indonesia.Mengungkapkan dan menganalisis dampak yuridis dari Putusan PTUN No NO. 55/G/2012/PTUN-JKT terhadap pelaksanaan tender jasa konstruksi di Kalimantan Barat. Mengungkapkan dan menganalisis upaya pengaturan lembaga pengembangan jasa konstruksi yang lebih efektif dan efesien ke depan. Melalui metode penelitian Bersifat Yuridis karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (*norm*). Pengertian kaidah di sini meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai, pengaturan hukum konkrit dan sistem hukum. Berkaitan dengan penelitian hukum normatif obyeknya berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal maka melaui metode penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Berdasarkan kronologisnya kasus timbulnya dualisme dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memang agak rumit dan membingungkan. Peraturan menteri yang berisikan tentang kepengurusan LPJK tersebut di nilai oleh LPJK Versi Munas tidak adil dan sarat dengan kepentingan oleh pejabat tertentu. Pihak LPJK Munas memandang mekanisme musyawarah nasional adalah yang paling kuat secara hukum, dan mereka memandang bahwa STI (Sistem Teknologi Informasi) LPJK versi PU yang diadopsi Djoko Kirmanto sebagai Kepala kementerian Pkekerjaan Umum adalah hasil dari Munas 2008 yang selayaknya tidak sebaik STI LPJK versi munas. Polemik dualisme LPJK ini tidak lama kemudian menimbulkan permasalahan, terutama bagi LPJK daerah. Dampak Yuridis Dari Putusan PTUN Nomor: 55/G/2012/PTUN-JKT terkait dengan Objek sengketa 1 dan 2 yaitu Nomor : HKI 4.01.05.2171/11 Surat dan Nomor : 054823 tanggal 10 Januari 2012, mengenai Pendaftaran Perubahan Alamat Merek LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dan Ciptaan Logo LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dalam Daftar Umum Ciptaan Nomor 054823, yang ditandatangani oleh Direktur Hak Cipta, Design Industri, Design Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jelas menyatakan bahwa hak cipta berupa Logo itu sah secara hokum di miliki oleh LPJK versi Munas. Hal terebut mengakibatkan kisruh di kedua lembaga tersebut yang mana masing-masing lembaga tersebut mengklaim ke absahan pemakaian logo. Berdarnya surat edaran dari masing-masing lembaga sangat berdampak terhadap kepastian hokum tender Jasa Konstruksi yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Barat pada khususnya. Upaya-Upaya hukum pengaturan lembaga pengembangan jasa konstruksi yang lebih efektif dan efesien ke depan pasca Putusan PTUN No. 55/G/2012 PTUN-JKT yaitu dengan melakukan upaya hukum perdata, upaya hukum tata negara, upaya hukum administrasi, dan upaya hukum pidana . adapun saran penulis terhadap penelitian ini adalah Pelaksanaan putusan PTUN PTUN No. 55/G/2012 PTUN-JKT dirasa belum efektif dan efesien sehingga harus karena kurangnya ketaatan dari pengurus atau pejabat Negara yang ada dilingkungan kedua LPJK tersebut. Sudah waktunya pemerintah (Presiden) di tuntutan untuk mengambil sikap tegas mengakhiri konflik ini, agar ada Kepastian hokum terhadap dunia konstruksi di

Indonesia . Perlunya penerapan prinsip *good governance* sehingga pelaksanaan pemerintahan akan lebih transparan, berpihak pada demokrasi dan kemakmuran rakyat. Dan konflik-konflik mengenai Pelaksanaan tender Jasa Konstruksi bisa lebih berkurang. Jika sudah diputus oleh Pengadilan TUN, maka pelaksanaannya lebih mudah ditaati dan terselesaikan dengan kepastian hukum yang konkrit.

ABSTRACT

This thesis discusses the impact of judicial verdict of no. 55 / g / 2012 / PTUN-jkt to tender for construction in West Kalimantan ".As for the purpose of writing this Tesis is Getting the data and analyze the factors that cause body dualism Indonesia.Mengungkapkan development and construction services in analyzing the impact of the judicial verdict of No. NO. 55 / G / 2012 / PTUN-JKT to tender for the implementation of construction in West Kalimantan. Expressing and analyzing the development of institutional arrangements effort construction services more effectively and efficiently in the future. Through research methods Characteristically Juridical as the target of this research is legal or norm (norm). Understanding the rules here include the principle of law, legal norms in terms of value, setting concrete law and the legal system. in connection with normative legal research object in the form of general principles of law, legal systematics, extent of vertical and horizontal sync, then through metode the study was concluded that the incidence of cases Based chronological dualism of Construction Services Development Board (LPJK) is rather complicated and confusing. Regulation of the Minister that contains the management LPJK in value by LPJK Version Munas unfair and loaded with interest by certain officials. National Conference party looked LPJK national consensus mechanism is the most powerful legally, and they perceive that the STI (Information Technology Systems) LPJK version adopted PU Djoko Kirmanto as head of the Ministry of Public Pekerjaan is the result of the 2008 National Conference should not be as good as the STI LPJK munas version. Polemic LPJK dualism is not long before problems occur, especially for LPJK area. Juridical Impact Of The verdict Number: 55 / G / 2012 / PTUN-JKT associated with Object dispute 1 and 2, namely Number: IPR 4.01.05.2171/11 Letter and Number: 054 823 dated January 10, 2012, regarding Trademark Registration Change of Address INSTITUTIONAL DEVELOPMENT SERVICES CONSTRUCTION (LPJK) and Logo Creation CONSTRUCTION DEVELOPMENT INSTITUTE (LPJK) in the General Register of Works No. 054 823, which was signed by the Director of Copyright, Industrial Design, Design of Integrated Circuits and Trade Secrets on behalf of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia clearly states that the copyright in the form of the logo valid legally owned by the National Conference LPJK version. It stretcher resulted in chaos in the two institutions in which each of these institutions claim to invalidity appliances logo. Berdarnya circulars of each institution have seriously affected the legal certainty tender Construction Services in Indonesia in general and especially in West Kalimantan. Efforts laws governing construction services development agencies more effectively and efficiently to the front post verdict of No. 55 / G / 2012-DPS administrative court is to conduct civil remedies, efforts constitutional law, administrative law efforts, and the efforts of the criminal law. As for the suggestion terhadap authors of this study is the implementation of the decision of the Administrative Court Administrative Court No. 55 / G / 2012-DPS administrative court has not considered effective and efficient so it must be due to the lack of observance of the board or state officials that there are two LPJK the environment. It's time the government (President) in demand to take a firm stand end to this conflict, so that there is certainty of law to the world of construction in Indonesia. The need for the application of the principles of good governance so that the implementation of the government will be more transparent, pro-democracy and prosperity of the people. And conflicts regarding the tender exercising

Construction Services can be reduced. If it has been decided by the Court TUN, then its implementation easier adhered and resolved with concrete legal certainty.

Latar Belakang

Dalam kaitannya dengan jasa konstruksi, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Di dalam salah satu pertimbangan menimbang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 adalah bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Selain itu bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi didasarkan atas beberapa pertimbangan yang merupakan jawaban atas berbagai fenomena yang muncul di tengah masyarakat pada masa awal reformasi, seperti adanya tuntutan diwujudkannya *good governance*, tuntutan liberalisasi perdagangan internasional termasuk bidang jasa konstruksi dan kondisi lingkungan strategis serta kemampuan jasa konstruksi nasional.

Sebagai dasar pengembangan jasa konstruksi nasional, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 mencakup berbagai hal, di antaranya adalah: arah kebijakan, dasar hukum, kelembagaan dan pranata yang berasaskan kepada kejujuran dan keadilan, kemanfaatan, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, serta keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan pengaturan jasa konstruksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999, yaitu:

1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mewududkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

Sementara itu beberapa kondisi yang ada dari usaha jasa konstruksi di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Barat pada saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Usaha jasa konstruksi memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)..

2. Lapangan usaha di bidang jasa konstruksi masih sangat tergantung kepada ketersediaan dana pembangunan Pemerintah, (pusat dan daerah) sementara itu anggaran pembangunan Pemerintah relatif menurun.
3. Dukungan terhadap akses permodalan di bidang usaha jasa konstruksi sangat kecil, terlebih lagi dengan adanya kebijakan yang membatasi permodalan untuk sektor properti yang sangat berpengaruh terhadap usaha jasa konstruksi.
4. Dalam hal SDM, bidang jasa konstruksi juga masih sangat lemah khususnya ketersediaan tenaga ahli dan terampil yang bersertifikat.

Secara umum pembinaan jasa konstruksi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Masyarakat Jasa Konstruksi. Pembinaan Pemerintah mencakup tiga kegiatan yaitu pengaturan, pengawasan dan pemberdayaan. Pengaturan dilakukan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis. Pemberdayaan dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuh-kembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan bidang usaha, registrasi, sertifikasi keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa konstruksi, serta pengaturan peran masyarakat jasa konstruksi yang diwujudkan dalam bentuk Forum dan Lembaga, yang kemudian dinormatiskan dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pengaturan mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi serta peran masyarakat jasa konstruksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan usaha jasa konstruksi, sehingga dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dan perubahan kedua dengan Peraturan pemerintah Nomor 92 Tahun 2010.

Pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) UUJK. Kemudian Pasal 34 UUJK mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah dimaksud adalah PP No. 28 Tahun 2000 di mana masa bakti, rincian, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (3) PP No. 28 Tahun 2000. Sejak tahun 2000, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melaksanakan tugasnya berdasarkan AD/ART.

Pada tahun 2010, diundangkan PP Nomor. 4 Tahun 2010. Salah satu substansinya mengubah ketentuan Pasal 25 ayat (3) PP No. 28 Tahun 2000. PP Nomor. 4 Tahun 2010

mengamanatkan bahwa tatacara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja lembaga diatur dalam Peraturan Menteri. Pelaksanaan amanat pasal tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010.

Pada tanggal 10 Agustus 2011 telah dikukuhkan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) yang tata cara pemilihannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 junto Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 dan Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2010 junto Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2010. Namun di sisi lain, ada pihak yang tetap memaksakan menyelenggarakan Musyawarah Nasional LPJK untuk memilih Pengurus “LPJK” Masa Bakti 2011-2015 dengan tidak mengindahkan ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 junto Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 dan Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2010 junto Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2010. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 junto Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 junto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 sudah tidak mempunyai kekuatan yuridis yang mengikat.

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa terdapat dua lembaga pengembangan jasa konstruksi, yaitu LPJK berdasarkan AD/ART dan LPJK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 junto Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 dan Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2010 junto Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2010.

Terdapatnya dualism LPJK berdampak yuridis dalam pelaksanaan tender jasa konstruksi termasuk di Kalimantan Barat. Saat ini pihak yang menamakan dirinya “LPJK” Hasil Munas 2011 melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana layaknya LPJK yang resmi sesuai peraturan perundangan, antara lain audiensi, rapat-rapat dengan asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi dan dengan LPJK Daerah, serta pelayanan SBU/SKA/SKT. Yang bersangkutan juga menguasai/menggunakan aset-aset LPJK, di antaranya Gedung Graha, kendaraan, peralatan kantor, alat komunikasi, dan lain-lain milik LPJKN, serta menggunakan logo dan kop surat LPJK. Kegiatan ini telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian pada masyarakat terutama dalam hal yang

berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Keterampilan (SBU/SKA/SKT) yang seharusnya hanya dilaksanakan oleh LPJKN yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikat tersebut sangatlah penting karena merupakan syarat dalam mengikuti pelelangan dan melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUK. Apabila masih terdapat kerancuan di masyarakat mengenai penerbitan SBU/SKA/SKT, maka akan menimbulkan hambatan dalam proses pelelangan, dan pada akhirnya akan mengganggu pembangunan infrastruktur di Indonesia termasuk di Kalimantan Barat.

Untuk Tahun Anggaran 2012, SBU/SKA/SKT yang dapat digunakan dan berlaku dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi adalah sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2011 sebagai berikut:

- a. SBU/SKA/SKT yang diterbitkan sebelum tanggal 30 September 2011 dan belum habis masa berlakunya; dan
- b. SBU/SKA/SKT yang baru dan perpanjangan yang habis masa berlakunya setelah tanggal 30 September 2011, diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 10 Agustus 2011 dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011.

Pembuktian kualifikasi (SBU/SKA/SKT) harus berpedoman pada Buku Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, di mana Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen. Dengan demikian data badan usaha jasa konstruksi dalam Sistem Teknologi Informasi (STI) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN) tidak digunakan sebagai pembuktian kualifikasi untuk persyaratan tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi..

Kementerian Pekerjaan Umum, berhasil menetapkan kepengurusan LPJK Nasional periode 2011-2016 dan telah dilantik sebagai Pengurus tanggal 10 Agustus 2011. Kini mantan pengurus LPJKN periode 2006-2011 kecuali mantan Ketua Umumnya, Malkan Amin, mengadakan Munas tanggal 30 September 2011 dan memilih Pengurus LPJKN periode 2011-2016. Awalnya, Munas LPJKN itu adalah khusus pertanggung jawaban selama kepengurusan sebelumnya nyatanya adalah pembentukan Pengurus baru diluar yang telah ditetapkan oleh Kementerian PU.

Kepengurusan LPJKN dari Kementerian Pekerjaan Umum dinilai menyalahi ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga LPJKN. Selain itu, pengambil alihan

rekrutmen Pengurus LPJKN tidak melalui Munas bertentangan dengan ketentuan perundang Undangan yang berlaku.

Mahkamah Agung RI memang telah memutuskan bahwa beberapa ketentuan dari Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2010 bertentangan dengan Undang Undang. Namun tidak membatalkan ketentuan lain yang memberikan kewenangan kepada Kementerian untuk melakukan rekrutmen yang ditentukan Anggaran Dasar sebelumnya. Oleh karenanya, sesuai hirarki perundang undangan maka Peraturan Pemerintah No 4 yang diubah dengan Peraturan No 92 adalah sah dan lebih tinggi dibandingkan Anggaran Dasar.

Namun setelah melalui proses peradilan, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang dibentuk pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah dinyatakan **tidak berhak menggunakan nama, logo dan segala sesuatunya tentang LPJK** berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan PTUN Jakarta, **NO. 55/G/2012/PTUN-JKT** tertanggal 2 Agustus 2012. Penolakan pemakaian nama dan logo LPJK mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum mengenai sertifikasi badan usaha (SBU) dalam mengikuti tender di instansi pemerintah yang sudah meresahkan pengusahaan jasa konstruksi. Oleh karena ini masih belum jelas LPJK mana yang sah dan yang tidak.

Bila dualisme LPJK ini, tetap berlanjut yang rugi adalah masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah, karena tidak ada kepastian hukum dalam pengelolaan jasa konstruksi di Indonesia. Pelaku konstruksi di daerah juga merasa resah dengan dua LPJK yang saat ini ada. Mereka resah karena tidak ada kepastian mengikuti tender proyek infrastruktur. Bila tetap dibiarkan akan menyebabkan kekacauan sektor konstruksi dan menimbulkan ketetangan sosial karena kebingungan pelaku konstruksi mengikuti tender.

Keadaan ini juga menyebabkan penyerapan anggaran infrastruktur APBN/APBD ditengarai dapat berkurang lebih dari 50% akibat adanya dua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang memunculkan dualisme sertifikasi. Dualisme ini juga akan membingungkan masyarakat konstruksi terkait penerbitan sertifikat badan usaha (SBU), sertifikat keterampilan kerja (SKT), dan sertifikat keahlian kerja (SKA). SBU dan sertifikat tenaga ahli menjadi persyaratan wajib dalam pelelangan, sehingga jika sertifikat itu cacat hukum bisa mengakibatkan tidak sah atau batalnya proses pelelangan.

Dengan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam bentuk penelitian tesis dengan judul **"DAMPAK YURIDIS**

PUTUSAN PTUN NO. 55/G/2012/PTUN-JKT TERHADAP TENDER JASA KONSTRUKSI DI KALIMANTAN BARAT "

A. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian pada Latar Belakang Penelitian, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi dualisme lembaga pengembangan jasa konstruksi yang berdampak yuridis bagi pelaksanaan tender jasa konstruksi di Indonesia ?
2. Bagaimana dampak Yuridis Tentang Putusan NO. 55/G/2012/PTUN-JKT terhadap pelaksanaan tender jasa konstruksi di Kalimantan Barat ?
3. Bagaimana upaya pengaturan lembaga pengembangan jasa konstruksi yang lebih efektif dan efisien ke depan?

PEMBAHASAN

A. Dualisme Lembaga Jasa Konstruksi di Indonesia

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Ide pembentukan ini selain perintah undang-undang juga bertujuan sebagai wadah asosiasi dan atau Jasa Kontraktor diantaranya untuk mengayomi, membina, dan mengembangkan jasa konstruksi di Indonesia.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) kini ada dua kepengurusan. Pertama yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Pemerintah No 28 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2010 yang diubah lagi dengan PP No 92. Atas dasar ketentuan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum sejak Februari tahun 2011 telah memberikan edaran dan pengumuman kepada LPJK Nasional periode 2006-2011 dan seluruh LPJK Daerah untuk mengakhiri berlakunya Anggaran Dasar dan Rumah Tangga yang dibentuk oleh LPJKN sebelumnya sebagai suatu aturan pelaksanaan operasional LPJKN periode sampai 30 Agustus 2011. Dalam transisi itu, Kementerian Pekerjaan umum pun masih memberikan kesempatan kepada pengurus yang lama untuk membenahi seluruh administrasi dengan larangan untuk menentukan kebijakan lain yang strategis.

Kementerian Pekerjaan Umum, berhasil menetapkan kepengurusan LPJK Nasional periode 2011-2016 dan telah dilantik sebagai Pengurus tanggal 10 Agustus 2011. Kini mantan pengurus LPJKN periode 2006-2011 kecuali mantan Ketua Umumnya, Malkan Amin, mengadakan Munas tanggal 30 September 2011 dan memilih Pengurus LPJKN periode 2011-2016. Awalnya, Munas LPJKN itu adalah khusus pertanggung jawaban selama kepengurusan sebelumnya nyatanya adalah pembentukan Pengurus baru diluar yang telah ditetapkan oleh Kementerian PU.

Kepengurusan LPJKN dari Kementerian Pekerjaan Umum dinilai menyalahi ketentuan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga LPJKN. Selain itu, pengambil alihan rekrutmen Pengurus LPJKN tidak melalui Munas bertentangan dengan ketentuan perundang Undangan yang berlaku. Mahkamah Agung RI memang telah memutuskan bahwa beberapa ketentuan dari Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2010 bertentangan dengan Undang Undang. Namun tidak membatalkan ketentuan lain yang memberikan kewenangan kepada Kementerian untuk melakukan rekrutmen yang ditentukan Anggaran Dasar sebelumnya. Oleh karenanya, sesuai hirarki perundang undangan maka Peraturan Pemerintah No 4 yang diubah dengan Peraturan No 92 adalah sah dan lebih tinggi dibandingkan Anggaran Dasar.

Namun setelah melalui proses peradilan, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang dibentuk pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah dinyatakan tidak berhak menggunakan nama, logo dan segala sesuatunya tentang LPJK berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan PTUN Jakarta, No W2-TUN-1-862/HK.06/VIII/20012 tertanggal 2 Agustus 2012. Penolakan pemakaian nama dan logo LPJK mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum mengenai sertifikasi badan usaha (SBU) dalam mengikuti tender di instansi pemerintah yang sudah meresahkan pengusahaan jasa konstruksi. Oleh karena ini masih belum jelas LPJK mana yang sah dan yang tidak.

Bila dualisme LPJK ini, tetap berlanjut yang rugi adalah masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah, karena tidak ada kepastian hukum dalam pengelolaan jasa konstruksi di Indonesia. Pelaku konstruksi di daerah juga merasa resah dengan dua LPJK yang saat ini ada. Mereka resah karena tidak ada kepastian mengikuti tender proyek infrastruktur. Bila tetap dibiarkan akan menyebabkan kekacauan sektor konstruksi dan menimbulkan ketetangan sosial karena kebingungan pelaku konstruksi mengikuti tender.

Keadaan ini juga menyebabkan penyerapan anggaran infrastruktur APBN/APBD pada 2012 ditengarai dapat berkurang lebih dari 50% akibat adanya dua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang memunculkan dualisme sertifikasi. Dualisme ini juga akan membingungkan masyarakat konstruksi terkait penerbitan sertifikat badan usaha (SBU), sertifikat keterampilan kerja (SKT), dan sertifikat keahlian kerja (SKA). SBU dan sertifikat tenaga ahli menjadi persyaratan wajib dalam pelelangan, sehingga jika sertifikat itu cacat hukum bisa mengakibatkan tidak sah atau batalnya proses pelelangan.

LPJKN sekarang gempar dan masih jadi pertanyaan siapa yang bertanggung jawab. Akan lebih bijaksana dan mudah semua pihak sama-sama duduk dan merapatkan barisan untuk mencapai kata mufakat demi hukum dan masyarakat jasa konstruksi, serta terhadap masyarakat luas. jika ini terus-menerus didiamkan, akan menyebabkan banyak kerugian bagi semua pihak misalkan infrastruktur pemerintah pun terbengkalai.

B. Dampak Yuridis Tentang Putusan PTUN NO. 55/G/2012/PTUN-JKT Terhadap Pelaksanaan Tender Jasa Konstruksi Di Kalimantan Barat?

Di dalam pokok perkara Putusan PTUN di atas terkait dengan Objek sengketa 1 dan 2 yaitu Nomor : HKI 4.01.05.2171/11 Surat dan Nomor : 054823 tanggal 10 Januari 2012, mengenai Pendaftaran Perubahan Alamat Merek LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dan Ciptaan Logo LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dalam Daftar Umum Ciptaan Nomor 054823, yang ditandatangani oleh Direktur Hak Cipta, Design Industri, Design Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jelas menyatakan bahwa hak cipta berupa Logo itu sah secara hukum di miliki oleh LPJK versi Munas.

Oleh sebab itu Sejak Terbitnya Putusan PTUN No.55/G/2012/PTUN-JKT, LPJK versi Munas Mengeluarkan Pengumuman Nomor : 02/TIM HUKUM LPJKN/I/2012, bertindak sebagai kuasa hukum LPJKN Versi munas Sugeng Teguh Santoso,SH, M. Philipus Tarigan,SH dan Martina, SH beralamat di Graha LPJKN Nasional Jln. Antri Pondok Indah No. 80 Kabayoran Lama, Jakarta Selatan, yang isinya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak :

1. Menggunakan tanpa sengaja dan tanpa hak :
 - a. Nama Lembaga Jasa Konstruksi dengan singkatan LPJK
 - b. Lambang Logo LPJK :

2. meniru dengan sengaja dan tanpa hak format/tampilan/menu dan mengambil/memindahkan/mentranfer/mengubah :

- a. system Informasi Manajemen Jasa Konstruksi (SIMJAKON) badan usaha
- b. system Informasi Manajemen Jasa Konstruksi (SIMJAKON) Profesi
- c. Sistem Teknologi Informasi (STI) web.lpjg.org

tanpa seijin Dewan Pengguna Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang berkedudukan di gedung Graha LPJK dengan Ketua Umum Ir. Rendy Lamadjido,MBA dan Sekretaris Umum Ir. S. Poltak H. Sitomorang,SH. Nama merek LPJK, lambang/logo LPJK, SIMJAKON Badan Usaha LPJK,SIMJAKON Profesi LPJK,STI web.www.lpjg.org sebagaimana di maksud butir 1 dan 2 telah dilindungi oleh sertifikat merek LPJK Nomor : IDM000076499 dan perubahannya, sertifikat Ciptaan logo/lambang LPJK Nomor 054823, Sertifikat Ciptaan SIMJAKON Badan Usaha LPJK Nomor 054819, sertifikat ciptaan SIMJAKON Profesi LPJK Nomor 054821dan Sertifikat Ciptaan STI LPJK web.www.lpjg.org Nomor 054820. Penggunaan Nama Merek LPJK, Lambang/logo LPJK, SIMJAKON badan usaha LPJK, SIMJAKON profesi LPJK,STI LPJK web.www.lpjg. tanpa seijin sebgaimana di maksud di atas adalah merupakan tindak pidana.

Setelah megeluarkan pengumuman kepada seluruh masyarakat Indonesia, LPJK versi Munas yang di ketuai oleh Ir. Endy Lamadjido,MBA, mengeluarkan surat Edaran Nomor : 120/LPJK/D/VI/2012 kepada 4 (empat) Kelompok Unsur Anggota LPJK, Anggota Dewan Pengurus LPJK Nasional, Anggota Majelis Pertimbangan LPJK Nasional, Ketua Umum LPJK Daerah dan Pelaksana Tugas LPJK Daerah dan Kuasa Pelakasana Tugas LPJK Daerah. Adapun prihal sudart edaran tersebut adalah :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 12 juni 2012 telah menolak gugatan Dewan Pengurus LPJK Nasional atas keputusan menteri pekerjaan umum nomor : 223/KPTS/M/2011 tentang penetapan organisasi dan pengurus lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) periode 2011-2015 yang amar putusannya sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan tergugat II intervensi tidak diterima selurunya.

Dalam Pokok perkara

- Menolok gugatan penggugat dan penggugat II intervensi seluruhnya.
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara mengatur antara lain penguat dapat mengajukan pemeriksaan di tingkat banding kepada Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara, Memeriksa di tingkat Mahkamah Agung dan pemeriksaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan tersebut Dewan Pengurus LPJK Nasional akan mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
 3. dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata usaha Negara mengakui secara sah keberadaan LPJK Nasional atau Dewan Pengurus LPJK Nasional berdasarkan AD/ART LPJK sebagai subjek hukum yang kompeten mengajukan gugatan dan upaya hukum lainnya terhadap Menteri Pekerjaan Umum.
 4. berkaitan dengan hal tersebut butir 1 sampai dengan butir 3 maka kepada seluruh Dewan Pengurus LPJK Nasional, Dewan Pengurus/pelaksana tugas/kuasa Pelaksana Tugas LPJK Daerah seluruh Indonesia agar tetap melaksanakan layanan sehari-hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan putusan PTUN No.55/G/2012/PTUN-JKT tersebut di atas LPJKN yang di motori oleh Kementerian Pekerjaan Umum melakukan Pres conference yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan Singkat periodisasi keberadaan LPJK Nasional

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi LPJK dibentuk pertama kali melalui deklarasi yang dihadiri oleh 8 (delapan) asosiasi perusahaan, 16 (enam belas) asosiasi profesi serta wakil pemerintah, pakar dan perguruan tinggi pada tanggal 9 Agustus 1999. Keputusan pembentukan lembaga ini berdasarkan pada hasil konvensi nasional yang difasilitasi oleh Departemen Pekerjaan Umum.

Kepengurusan LPJK Nasional (LPJKN) ditetapkan dalam jangka waktu periodisasi sebagai berikut :

- 1) Periode I tahun 1999-Tahun 2003 sebagai Ketua umum : Agus G. Ginanjar Kartasasmita
- 2) Periode II Tahun 2003-Tahun 2007 sebagai ketua umum : Sulistijo Sidarto Mulyo
- 3) periode III Tahun 2003-Tahun 2007, sebagai ketua umum : H.M. Markan Amin
- 4) Periode IV Tahun 2011-Tahun 2015 sebagai ketua : Tri Widjanto

Memperhatikan periodisasi kepengurusan LPJK Nasional sesuai butir b tersebut di atas menunjukkan bahwa kepengurusan LPJKN periode IV tahun 2011-2015 yang diketuai oleh Triwidjanto J merupakan tindak lanjut kepengurusan sebelumnya.

Penjelasan singkat tentang Landasan Hukum pembentukan Kepengurusan LPJKN periode ke IV :

- UU No. 18 Tahun 1999 tentang jasa Konstruksi
- PP No. 28 tahun 2000 tentang Usaha dan peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Pasal 25

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 mempunyai sifat nasional, independent, mandiri, dan terbuka dalam kegiatannya bersifat nirlaba
 - (2) Pembentukan sah secara lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah secara hukum organisatoris dalam pasal 24
 - (3) Masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 25 tersebut di atas diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang mengatur ketentuan tentang pembentukan, masa bakti, rincian tugas dan fungsi, serta mekanisme kerja lembaga, yang diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai sifat nasional, independent, mandiri, dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba
 - (2) Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi dan kepengurusan Lembaga tingkat provinsi dikukuhkan oleh Gubernur
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga diatur dalam peraturan Menteri
- Produk Statuter PP No. 04 Tahun 2010 juncto PP No. 92 Tahun 2010 untuk menjabarkan amanah Pasal 25 ayat (3) tersebut di atas adalah Permen PU No. 10/PRT/M/2010 juncto Permen PU No. 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara

Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

- Setelah melalui proses pemilihan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, maka ditetapkan Pengurus LPJK 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011/2015.
- Dengan landasan hukum tersebut diatas, sudah terbentuk Pengurus LPJK di 33 tingkat Provinsi.

2. Terkait Proses Hukum terutama dengan adanya berbagai gugatan kepada LPJK, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Anilisa Putususan PTUN NO. 55/G/2012/PTUN-JKT**

PTUN 1 : Gugatan ATAKI No. 196/G/2011/PTUN-JAK dengan obyek sengketa SK Menteri PU No. 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 yang keputusannya menyatakan gugatan ATAKI ditolak dan sudah berkekuatan hukum tetap.

PTUN 2 : gugatan Ir. Rendy lamadjido, MBA dan Ir. S. Poltak H. Situmorang, SH No. 05/G/2011/TUN-JKT dengan obyek sengketa SK Menteri PU No. 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 yang keputusannya menyatakan gugatan tersebut ditolak saat ini penggugat mengajukan banding namun sampai dengan ditetapkannya putusan banding, maka putusan PTUN tingkat I tetap berlaku dan mengikat secara hukum.

PN Jaksel : Gugatan Ir. Rendy tamadjido MBA dan Ir. S. Poltak H. Situmorang SH No. 16/Pdt.G/2012/PN JakSel dengan obyek sengketa SK Menteri PU No. 223/KPT/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 dan SE Menteri PU No. 09/SE/M/2011 perihal pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Penyedia Jasa Konstruksi serta Penerbitan Perlem No. 02, 03, 04 dan 05 tahun 2011 untuk mengatur tata cara Registrasi SBU/SKA/SKTK, yang keputusannya menyatakan gugatan ditolak dan sudah berkekuatan hukum tetap.

a. Terkait dengan logo LPJK dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Masalah Logo LPJK adalah milik Lembaga bukan milik perorangan
- 2) Lembaga yang memiliki legal standing adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi PP No. 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri No. 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri PU No.10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Masa Bakti Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- 3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada butir 2) di atas ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Nasional Periode 2011-2012 yang menetapkan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 yang terdiri atas wakil-wakil kelompok unsur asosiasi perusahaan, asosiasi profesi pakar/ perguruan tinggi dan pemerintah yang telah dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- 4) Pengurus LPJK Nasional tidak akan melakukan banding atas putusan perkara : nomor 0542823 karena pada prinsipnya logo adalah milik lembaga.

3. Terkait Implementasi Menuju Penerapan Permen PU Nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

a. Program/Kegiatan yang SEDANG dilaksanakan LPJKN

- 1) Menyusun Perlem tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha.
- 2) Menyusun Perlern tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja.

- 3) Menyusun Perlem tentang Registrasi Badan Usaha.
- 4) Menyusun Perlem tentang Registrasi Tenaga Kerja.
- 5) Menyusun Perlem tentang Organisasi dan Tata Laksana Lembaga.
- 6) Menyusun Perlem tentang Lisensi
- b. Program/Kegiatan yang AKAN dilaksanakan LPJKN
 - 1) Melaksanakan Diklat untuk Asesor Lisensi.
 - 2) Melaksanakan Diklat untuk Asesor tenaga kerja
 - 3) Melaksanakan workshop untuk Asesor Badan usaha (RCC)
 - 4) Mengembangkan standar modul pelatihan tenaga ahli dan tenaga terampil.
 - 5) Mendorong Asosiasi untuk aktif melaksanakan pelatihan bagi anggotanya.
 - 6) Sosialisasi perlem terkait dengan registrasi badan usaha.
 - 7) Sosialisasi perlem terkait dengan registrasi tenaga kerja
 - 8) Sosialisasi perlem terkait dengan pembentukan unit sertifikasi.
 - 9) Sosialisasi perlem terkait dengan lisensi.
 - 10) Menyelenggarakan Diklat asesor lisensi.
 - 11) Menyelenggarakan Diklat Asesor Kemampuan Badan Usaha.
 - 12) Menyelenggarakan Diklat Asesor Kompetensi Tenaga Kerja.
 - 13) Pembentukan Unit Sertifikasi Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi

Terkait Implementasi Menuju Penerapan Permen PU Nomor : 08/PRT/M/2011

tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, maka kepada LPJK Propinsi :

- a. Diminta kepada seluruh LPJK Provinsi agar tetap melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- b. Draft perlem yang sudah disampaikan ke LPJK Provinsi sejak tanggal 18 Agustus 2012 agar diberikan masukan guna penyempurnaan Perlem yang akan diterbitkan oleh LPJK Nasional dalam waktu dekat ini.
- c. Diharapkan LPJK Provinsi dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan jasa konstruksi kedepan.
- d. LPJK Provinsi agar mampu menjalin kerja sama, baik dengan masing - masing LPJK provinsi maupun dengan LPJK Nasional dan Institusi/Kelembagaan lainnya yang terkait dengan kegiatan di bidang konstruksi guna peningkatan kinerja LPJK.
- e. Diminta kepada LPJK Provinsi untuk tetap menjalankan pelayanan registrasi SBU/SKA/SKTK dengan menggunakan identitas LPJK seperti biasa.
- f. Dengan akan diterbitkannya Perlem tentang Pembentukan Unit Srtifikasi dan Perlem terkait lainnya, diharapkan LPJK Provinsi menyiapkan diri untuk Pembentukan Unit Sertifikasi di prorinsi masing-masing.

Akibat Penjelasan tersebut diatas memicu kebingungan di sektor konstruksi terjadilah dua versi Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Negara (LPJKN) yang identitas hukumnya berbeda. Mulai muncul kekhawatiran para pelaku proyek pemerintah soal legalitas penerbitan SBU, SKA, dan SKTK. Bambang menegaskan perkembangan terakhir dari dua versi mengenai siapa yang paling berhak atas aset-aset LPJK. Mulai dari aset fisik, hardware, capital, system informasi jasa kontruksi (STI), sampai logo LPKJ yang digunakan oleh LPJK versi munas dan musda selama ini. Secara legalitas, aset dan prosedural yang selama ini menjadi dasar operasional dari

LPJK versi Munas dan Musda, maka sudah jelas segala aset maupun sistem informasi yang ada sekarang ini tetap menjadi milik LPJK versi Munas dan Musda. Baik aset nasional maupun aset di daerah, (Hasil Wawancara dengan Ketua LPJK Versi Musda Ir. Bambang Widiyanto).

Dari surat edaran di atas jelas bahwa Penggunaan logo LPJK yang ada sekarang oleh versi LPJK versi PU bisa dikategorikan perbuatan melanggar hukum. Karena secara hukum logo tersebut merupakan milik LPJK versi Munas dan Musda yang diatur oleh AD/ART LPJK dan telah dipatenkan. Salah satu tugas LPJK adalah menerbitkan SBU, SKA dan SKTK, selain tugas-tugas lainnya di bidang diklat dan litbang. Bambang menjelaskan, dalam proses penerbitan SBU, SKA dan SKTK diperlukan suatu sistem operasi yang baik dan layak uji serta telah melewati proses sertifikasi manajemen mutu (ISO 9001) seperti yang dimiliki oleh LPJK versi Munas dan Musda selama ini. Setiap SBU, SKA dan SKTK harus memiliki nomor registrasi yang unik (tidak ganda) dan dikeluarkan secara online (bukan manual). Saat ini hanya LPJK versi Munas dan Musda yang memiliki STI yang andal dalam hal ini. Fasilitas yang sama tidak dimiliki LPJK versi PU. Sistem informasi yang teruji dalam melayani kepentingan jasa konstruksi nasional saat ini hanya dimiliki oleh STI LPJK versi Munas dan Musda. Sementara beberapa waktu lalu berdasarkan surat edaran Menteri PU dan aturan pendukungnya, telah disampaikan bahwa SBU, SKA dan SKTK yang habis masa berlaku setelah 31 September 2011 harus menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh LPJK versi PU.

Sebagaimana peraturan LPJK versi PU Nomor 2 Tahun 2011 yang hampir 100 persen mengadopsi peraturan LPJKN versi Munas Nomor 11a Tahun 2008. Dalam peraturan lembaga LPJK versi PU itu dicantumkan penggunaan sistem informasi jasa konstruksi dan perangkatnya, yang sampai sekarang ini justru belum dimiliki LPJK versi PU. Dalam hal ini, diperlukan keterbukaan pikiran dan pemahaman dari semua pihak agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebagai eksekusi dari tindakan yang dilakukan secara sepihak, tanpa memikirkan dampak jangka panjang khususnya bagi masyarakat jasa konstruksi.

C. Upaya-Upaya hukum pengaturan lembaga pengembangan jasa konstruksi yang lebih efektif dan efisien ke depan pasca Putusan PTUN No. 55/G/2012 PTUN-JKT

Kemungkinan penerapan upaya Hukum untuk mengefektifkan pengaturan lembaga Jasa Konstruksi yang lebih efisien dan efektif pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari upaya hukum perdata, upaya hukum tata negara, upaya hukum administrasi, dan upaya hukum pidana .

1. Upaya Hukum Perdata

Di dalam Penjelasan Pasal 116 ayat (4) UU PTUN, uang paksa ditetapkan oleh hakim karena jabatannya. Meskipun dengan penetapan uang paksa dan/atau sanksi administrasi namun pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, mungkin ditempuh gugatan perdata perbuatan melanggar/melawan hukum (1365 BW) untuk sekaligus menuntut ganti rugi sehubungan dengan tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini LPJK yang tidak melaksanakan Putusan PTUN di sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Upaya Hukum Administrasi

Upaya hukum administrasi dimaksudkan untuk pejabat karier yang tunduk kepada ketentuan disiplin mengingat sanksi yang ditetapkan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (4) UU PTUN adalah sanksi administrasi.

Perlu diatur tentang jenis sanksi administrasi dan maksimal sanksi administrasi yang dapat diterapkan misalnya apakah juga dimungkinkan penerapan sanksi berupa pemberhentian jabatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur, bahwa kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, kepadanya dapat dikenakan hukuman disiplin atau sanksi administratif antara lain berupa:

1. Penurunan pangkat,
2. Pembebasan dari jabatan,
3. Pemberhentian dengan hormat, dan
4. Pemberhentian tidak dengan hormat (Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 dan peraturan terkait lainnya).

Dari beberapa jenis sanksi tersebut sebenarnya dapat dipilih, mana yang paling tepat diterapkan dalam penjatuhan sanksi administratif. Penulis sendiri berpendapat, sanksi administratif pembebasan dari jabatan, adalah paling tepat, karena pada saat pejabat tidak mematuhi putusan pengadilan, maka pada saat itu ia adalah tidak mau

menggunakan kewenangan jabatannya. Atau dengan kata lain pada saat itu ia sedang menggunakan jabatannya untuk melawan putusan badan peradilan, sehingga adalah tepat apabila ancaman pembebasan dari jabatan diterapkan apabila seorang pejabat tidak mematuhi putusan.

Perintah Penjatuhan Sanksi Administratif, Analognya dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, maka amar putusan yang berisi perintah penjatuhan sanksi administratif adalah ditujukan kepada pejabat yang berwenang menghukum tergugat. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana apabila yang menjadi tergugat adalah mereka yang pekerjaannya di luar dari PNS atau swasta. Dalam hal demikian, maka sanksi administratif tentunya tidak tepat untuk diterapkan. Dan Hakim dapat memilih upaya paksa yang lain, yakni uang paksa (*dwangsom*).

3. Upaya Hukum Pidana

Untuk mengefektifkan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 216 KUHPidana mengenai *contemp of court* dapat diterapkan terhadap pribadi pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam konteks *ius constituendum* sebagai sebuah hukum yang dicitakan dapat pula di dalam Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (RUU-AP) yang dalam waktu tidak terlalu lama akan disahkan menjadi Undang-Undang, karena telah masuk dalam Prolegnas, dimasukkan pengaturan mengenai sanksi pidana kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melengkapi sanksi administratif dan ganti rugi untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan eksekusi suatu putusan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kronologisnya kasus timbulnya dualisme dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memang agak rumit dan membingungkan. Peraturan menteri yang berisikan tentang kepengurusan LPJK tersebut di nilai oleh LPJK Versi Munas tidak adil dan sarat dengan kepentingan oleh pejabat tertentu. Pihak LPJK Munas memandang mekanisme musyawarah nasional adalah yang paling kuat secara hukum, dan mereka memandang bahwa STI (Sistem Teknologi

Informasi) LPJK versi PU yang diadopsi Djoko Kirmanto sebagai Kepala kementerian Pekerjaan Umum adalah hasil dari Munas 2008 yang selayaknya tidak sebaik STI LPJK versi munas. Polemik dualisme LPJK ini tidak lama kemudian menimbulkan permasalahan, terutama bagi LPJK daerah.

2. Dampak Yuridis Dari Putusan PTUN Nomor: 55/G/2012/PTUN-JKT terkait dengan Objek sengketa 1 dan 2 yaitu Nomor : HKI 4.01.05.2171/11 Surat dan Nomor : 054823 tanggal 10 Januari 2012, mengenai Pendaftaran Perubahan Alamat Merek LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dan Ciptaan Logo LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dalam Daftar Umum Ciptaan Nomor 054823, yang ditandatangani oleh Direktur Hak Cipta, Design Industri, Design Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jelas menyatakan bahwa hak cipta berupa Logo itu sah secara hukum dimiliki oleh LPJK versi Munas. Hal tersebut mengakibatkan kisruh di kedua lembaga tersebut yang mana masing-masing lembaga tersebut mengklaim keabsahan pemakaian logo. Berdarnya surat edaran dari masing-masing lembaga sangat berdampak terhadap kepastian hukum tender Jasa Konstruksi yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Barat pada khususnya.
3. Upaya-Upaya hukum pengaturan lembaga pengembangan jasa konstruksi yang lebih efektif dan efisien ke depan pasca Putusan PTUN No. 55/G/2012 PTUN-JKT yaitu dengan melakukan upaya hukum perdata, upaya hukum tata negara, upaya hukum administrasi, dan upaya hukum pidana .

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2009, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Alexander Seran, 1999, *Moral Politik Hukum*, Obor, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Tanpa Tahun, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Eddy Wibowo, et.al., 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005,
- Friedman, Lawrence W. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.
- _____, *Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York, P. 1002-1010 dan dalam *Law in America: a Short History*, Modern Library Chronicles Book, New York, 2002.
- Gunarto, Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Hari C. Hand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, Kuala Lumpur.
- Hartono, Sunaryati, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Irfan Islamy, M., 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Istislam, 2000, *Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*, Arena Hukum, Nomor 10 Tahun Keempat, Maret 2000, Jakarta.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulya Lubis, T., dan Richard M. Buxbaum, tanpa tahun, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-V, 2000.

Soekanto, Soerjono, tanpa tahun, *Prespektif Teoritis studi Hukum Dalam Masyarakat*, Erlangga, Jakarta.

....., dan Sri Mamoedji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Veeger, K.J., 1993, *Realitas Sosial (Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang *Jasa Konstruksi*.

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang *Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang *Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi* sebagaimana telah diubah dengan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010.